

STRATEGI

1. Sustainability dan desentralisasi
 - Keberhasilan program dalam mempertahankan cakupan yang tinggi di satu wilayah dan meningkatkan yang masih rendah di wilayah yang lain adalah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah setempat, hal ini ditegaskan dalam surat edaran Mendagri no. 440/1300/PUAD, tanggal 10 april 1990. Selain ikut memantau pencapaian UCI di wilayahnya, peran Pemda dalam penyediaan dana sangat diperlukan :

- a. Meningkatkan dan mempertahankan cakupan di atas 80% dan permintaan dengan indikator desa UCI dan desa non UCI
- b. Upaya mencapai ETN , ERAPO, dan Recam
- c. Meningkatkan mutu pelayanan
- d. Meningkatkan efisiensi
- e. Pemberdayaan Kab/Kota
- f. Peningkatan Kemitraan
- Status UCI di atas 80% diupayakan merata sampai desa , untuk menghindari daerah dengan cakupan rendah, yang merupakan kantong resiko tinggi PD3I yang nantinya akan merupakan sumber penularan bagi wilayah sekitarnya.

Tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja

1. Tingkat Pusat
 - Menetapkan strategi dan kebijakan nasional
 - Memberi petunjuk dalam menentukan sasaran dan target
 - Menyusun rencana kerja nasional berdasarkan kebijakan departemen kesehatan.
 - Melakukan standarisasi, membuat pedoman pelaksanaan dan teknis maupun administratif.
 - Mengadakan permuankonsultasi tingkat nasional dan memberikan bimbingan kepada daerah
 - Memberi pedoman dalam menentukan sasaran dan target

7. Memberi pedoman pemantauan , supervisi dan evaluasi serta memberi umpan baliknya.
8. Memberi pedoman penyediaan dana untuk pelatihan , operasional rutin dan khusus, pemantauan mutu cold chain dan potensi vaksin, survei untuk evaluasi program
9. Menyelenggarakan penyediaan vaksin yang mutunya dapat dipertanggung jawabkan
10. Menyusun pedoman penyediaan cold chain dan peralatan imunisasi yang mutunya dapat dipertanggung jawabkan yang secara bertahap secara desentralisasi.

11. Berperan aktif dalam kegiatan internasional bekerja-sama dengan instansi pemerintah di luar departemen kesehatan
12. Memprakarsai dan membina kerjasama lintas program dan lintas sektor di tingkat pusat.

Tingkat Propinsi

1. Membuat rencana pelaksanaan program berdasarkan kebijakan pusat dan daerah
2. Memberi petunjuk dalam menentukan sasaran dan target kabupaten dan kota
3. Mengolah dan merangkum rencana operasional kabupaten/ kota agar sesuai dengan strategi dan kebijakan dari pusat dan pemda tingkat I
4. Mengadakan pertemuan konsultasi tingkat propinsi dan memberikan bimbingan kepada daerah.
5. Melakukan PWS, supervisi dan evaluasi
6. Mengirimkan umpan balik hasil PWS ke Kab/Kota maupun laporan ke Gubernur dan Pusat

7. Mengupayakan penyediaan dana dan sarana dari APBD
8. Merangkum dan menganalisa kebutuhan cold chain dan peralatan imunisasi
9. Mengawasi mutu vaksin, sarana cold chain serta logistik
10. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas teknis dan administratif, merangkum dan menganalisa rencana kebutuhan tenaga
11. Membina kerja sama lintas program dan lintas sektor di tingkat propinsi
12. Membina peran serta masyarakat dan swasta.
13. Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.

Tingkat Kabupaten

1. Membuat rencana pelaksanaan program berdasarkan pengarahannya propinsi dan analisa situasi
2. Bersama puskesmas menentukan besarnya sasaran dan target cakupan
3. Mengarahkan dan merangkum rencana kerja puskesmas sesuai dengan petunjuk propinsi maupun analisa situasi puskesmas
4. Mengupayakan penyediaan dana dan sarana dari APBD Tingkat II
5. Merangkum dan menganalisa kebutuhan tenaga kerja puskesmas
6. Mengawasi mutu vaksin, sarana cold chain serta logistik vaksin

7. Merangkum dan menganalisa kebutuhan vaksin, cold chain, peralatan imunisasi puskesmas dan melaporkannya ke propinsi.
8. Mengadakan pertemuan konsultasi serta memberikan bimbingan kepada tenaga pelaksana di puskesmas
9. Melakukan PWS, supervisi dengan check list, membantu puskesmas memecahkan permasalahannya dan membuat analisa PWS dan hasil supervisi.
10. Mengirimkan umpan balik ke puskesmas maupun ke camat dan laporan ke propinsi
11. Bekerja sama lintas program dan sektoral
12. Membina peran serta masyarakat serta sektor swasta
13. Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di kab

Tingkat Kecamatan

1. Memberikan pelayanan imunisasi secara terpadu dengan program lain dalam kegiatan di posyandu, gedung puskesmas dan puskesmas pembantu
2. Menyusun rencana kerjaberdasarkan analisa situasi (PWS, umpan balik hasil supervisi) dan membuat jadwal pelayanan diseluruh wilayah pelayanan puskesmas
3. Membuat dan melembagakan PWS
4. Menentukan besarnya sasaran dan target atas petunjuk kabupaten
5. Memperluas dan memelihara jangkauan pelayanan imunisasi
6. Merencanakan kebutuhan vaksin, cold chain dan peralatan imunisasi
7. Merencanakan kebutuhan tenaga pelaksana imunisasi dan mengirimkannya ke kabupaten

8. Mengawasi mutu vaksin, sarana cold chain serta logistik lainnya.
9. Mengelola program sesuai dengan juklak dan juknis program imunisasi yang tersedia
10. Mengkoordinir laporan imunisasi dari RS, klinik swasta, praktek swasta di wilayah pelayanan puskesmas
11. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektoral
12. Mengevaluasi mutu pencatatan dan pelaporan serta cold chain
13. Menevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di puskesmas.

PEMANTAUAN

1. Program Imunisasi

a. Pemantauan wilayah setempat (PWS)

- untuk memantau cakupan program

prinsip :

- Memanfaatkan data yang ada , data dari laporan hasil imunisasi
- Menggunakan indikator sederhana

1). Jangkauan/aksesibilitas pelayanan

jumlah imunisasi DPT 1

----- x 100%

jumlah bayi lahir dalam 1 th

2). Tingkat perlindungan (efektivitas program)

Campak ;

Jumlah imunisasi campak x 100%

Jumlah bayi lahir dalam 1 th

3). Efektivitas/manajemen

drop out DPT 1 – campak

Jumlah imunisasi DPT 1 – jumlah

Imunisasi campak x 100%

DPT 1

4) Jangkauan/aksesibilitas pelayanan

TT IH =

jumlah imunisasi TT1 IH x 100%

jumlah ibu hamil dalam 1 th

5). Tingkat perlindungan program
(efektivitas)

TT 2 IH =

jumlah TT 2 IH + TT booster x 100 %

jumlah ibu hamil dalam 1 th